

## PEMBELAJARAN YANG BERKEADILAN SOSIAL

Oleh: C. Asri Budiningsih \*)

### Abstrak

Krisis kemanusiaan dan kebangsaan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia hingga kini belum dapat diatasi secara tuntas. Kondisi demikian diduga bermula dari apa yang dihasilkan oleh dunia pendidikan. Proses monopolisasi kepentingan, liberalisasi dan komersialisasi pendidikan serta kebutuhan sering kali terjadi. Anak seakan tidak boleh mengetahui mengenai realitas diri dan dunianya yang tertindas. Sebab kesadaran demikian akan membahayakan keseimbangan struktur masyarakat hirarkhis piramidal yang selama ini diinginkan oleh sekelompok elite sosial politis. Pendidikan yang berkeadilan sosial merupakan upaya yang diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di atas. Hal itu hanya dapat dicapai lewat proses pendidikan bebas dan metode pembelajaran aksi dialogal. Keaktifan siswa menjadi unsur amat penting dalam menentukan kesuksesan belajar. Pendidikan diharapkan mampu mewujudkan proses demokratisasi belajar, suatu proses pendemokrasian yang mencerminkan bahwa belajar adalah atas prakarsa anak. Demokrasi belajar berisi pengakuan hak anak untuk melakukan tindakan belajar sesuai dengan karakteristiknya. Salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat belajar yang demokratis dan/atau berkeadilan adalah adanya pengemasan pembelajaran yang beragam dengan cara menghapuskan penyeragaman kurikulum, strategi pembelajaran, bahan ajar dan evaluasi belajar. Peran sekolah dalam mewujudkan pendidikan yang berkeadilan sosial mampu mengembangkan seluruh potensi masing-masing anak secara maksimal tanpa harus mengganggu perkembangan potensi individu-individu lainnya.

**Kata kunci : Pembelajaran, Berkeadilan sosial**

### PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia hingga kini masih berada dalam berbagai krisis, seperti krisis ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum, bahkan ideologi dan kebangsaan. Kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan dengan merebaknya isu-isu moral dan nilai-nilai kehidupan di kalangan remaja seperti penggunaan

---

\*) Dosen KTP FIP UNY

narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba), pornografi, perkosaan, merusak milik orang lain, perampasan, penipuan, aborsi, penganiayaan, perjudian, pelacuran, pembunuhan, dan lain-lain, sudah menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan dan yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Akibat yang ditimbulkan cukup serius dan tidak dapat lagi dianggap sebagai suatu persoalan sederhana, karena tindakan-tindakan tersebut sudah merjus kepada tindakan kriminal. Suatu keprihatinan nasional, sebab para pelaku beserta korbannya adalah kaum remaja terutama pelajar dan mahasiswa.

Masalah disintegrasi bangsa yang mulai menggejala akhir-akhir ini juga harus mendapatkan perhatian sungguh, karena akan menentukan nasib dan masa depan generasi muda serta kelangsungan hidup bangsa Indonesia khususnya. Pendidikan yang berkeadilan sosial merupakan upaya yang diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. Jika semangat kesatuan dan persatuan mulai memudar dan tekad kebersamaan, tidak lagi dirasakan, maka yang ada hanyalah kelompok-kelompok yang berdasarkan kedaerahan, suku, agama yang berbeda-beda yang bersifat eksklusif dan fanatik, dan hanya mampu menghayati komunitas dan golongannya sendiri. Rasa kebangsaan terancam dari sudut primordialisme dan keseragaman yang tidak menghormati pluralitas masyarakat sebagai ciri khas bangsa Indonesia.

#### **PERAN PENDIDIKAN DAN MASALAH SOSIAL**

Masalah-masalah kehidupan bermasyarakat di era global dewasa ini yang ditandai oleh maraknya berbagai problem sosial adalah bersumber dari lemahnya sumber daya manusia dan/atau modal sosial yang ada di masyarakat. Persoalan-persoalan tersebut tentunya bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab dunia pendidikan, namun pendidikanlah yang paling banyak berperan terhadap munculnya persoalan-persoalan tsb.

Sesungguhnya, problem-problem sosial tersebut bersumber dari perilaku manusia Indonesia yang selama ini sudah terjangkit oleh virus keseragaman, dan virus inilah yang mengendalikan perilaku masyarakat dalam berbangsa dan

bernegara. Kesadaran dan penyadaran tentang keberagaman (*pluralisme*) bangsa sangat jauh dari kehidupan masyarakat. Pola pikir sentralistik, monolitik, *uniformistik*, sangat kental mewarnai pengemasan di berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Kekacauan demi kekacauan muncul di masyarakat diduga bermula dari apa yang dihasilkan oleh dunia pendidikan. Pendidikanlah yang sesungguhnya paling besar memberikan kontribusi terhadap kekacauan ini (Degeng, 1999). Orang-orang yang telah melewati sistem pendidikan, mulai dari pendidikan dalam keluarga, lingkungan sekitar, dan pendidikan sekolah, kurang memiliki kemampuan mengelola kekacauan, sehingga anak-anak selalu menjadi korban kekacauan.

Asumsi-asumsi yang melandasi program-program pendidikanpun sering kali tidak sejalan dengan hakekat belajar, hakekat orang yang belajar, dan hakekat orang yang mengajar. Dunia pendidikan, lebih khusus lagi dunia belajar, didekati dengan paradigma yang tidak mampu menggambarkan hakekat belajar dan pembelajaran secara komprehensif. Praktek-praktek pendidikan dan pembelajaran sangat diwarnai oleh landasan teoretik dan konseptual yang tidak akurat. Pendidikan dan pembelajaran selama ini hanya mengagungkan pada pembentukan perilaku keseragaman, dengan harapan akan menghasilkan keteraturan, ketertiban, ketaatan, dan kepastian (Degeng, 2000). Pembentukan ini dilakukan dengan kebijakan penyeragaman pada berbagai hal di sekolah. Paradigma pendidikan yang mengagungkan keseragaman ternyata telah berhasil membelajarkan anak-anak untuk mengabaikan keragaman/perbedaan.

Freire mengkritik, selama ini sekolah telah menjadi "alat penjinakan", yang memani-pulasi peserta didik agar mereka dapat diperalat untuk melayani kepentingan kelompok yang berkuasa. Demikian juga dengan pendapat Illich, sekolah semata-mata dijadikan alat legitimasi sekelompok elite sosial. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal tampil dan menghadirkan dirinya sebagai suatu lembaga struktural baru yang justru menggali jurang (*gap*) sosial. Segelintir orang yang mengenyam pendidikan formal membentuk kubu elite sosial (setelah ada legitimasi yang berupa ijazah, kepandaian dan kesempatan) dalam kehidupan masyarakat sering memegang peranan dan posisi kunci

dalam menentukan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam kondisi demikian, proses monopoliisasi kepentingan, liberalisasi dan komersialisasi pendidikan serta kebutuhan sering kali terjadi.

Tesis Freire yang bermula dari suatu keprihatinan akan praksis pendidikan yang dalam kenyataannya sebagai suatu proses pembenaran akan praktek-praktek penindasan yang sudah terlembaga, dalam kenyataannya justru semakin dilegitimasi lewat metode dan sistem pendidikan yang paternalistik, pendidikan ala bank, dengan menonjolkan kontra-diksi antara subyek (guru) dan obyek (murid) pendidikan, kaum penindas dan tertindas, pendidikan yang instruksional yang antialogis (Berybe, 2001). Anak digiring untuk selalu diam dan bersikap pasrah. Mereka seakan tidak boleh atau tidak semestinya tahu mengenai realitas diri dan dunianya yang tertindas. Sebab kesadaran demikian akan membahayakan keseimbangan struktur masyarakat hirarkhis piramidal yang selama ini diinginkan oleh sekelompok elite sosial politis.

Beberapa virus yang tampak di dunia pendidikan yang bersumber dari paradigma sentralisasi, di antaranya adalah penggunaan pakaian seragam, penggunaan kurikulum yang seragam, penggunaan strategi pembelajaran yang seragam, penggunaan buku sumber yang seragam, dan penggunaan strategi dan evaluasi belajar yang seragam pula. Penyeragaman ini dimaksudkan untuk mengingkari adanya keragaman. Semua bentuk penyeragaman ini ternyata telah berhasil membentuk anak-anak Indonesia yang sangat menghargai kesamaan, dan tanpa sadar ternyata juga telah berhasil membentuk anak-anak yang mengabaikan penghargaan pada keragaman. Anak-anak sangat sulit menghargai perbedaan. Perilaku yang berbeda lebih dilihat sebagai kesalahan yang harus dihukum.

Sistem pendidikan yang dianut bukan lagi suatu upaya pencerdasan kehidupan bangsa agar mampu mengenal realitas diri dan dunianya, melainkan suatu upaya pembutaan kesadaran yang disengaja dan terencana (Berybe, 2001) yang menutup proses perubahan dan perkembangan. Teori stimulus-respon yang sudah bertahun-tahun dianut dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran, tampak sekali mendukung sistem pendidikan tersebut. Teori ini mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Perilaku tertentu dapat dibentuk karena

dikondisi dengan cara tertentu dengan menggunakan metode indoktrinasi. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan *reinforcement*, dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Hubungan stimulus-respon, individu pasif, perilaku yang tampak, pembentukan perilaku dengan penataan kondisi yang ketat, *reinforcement* dan hukuman, ini semua dianggap sebagai unsur-unsur penting dalam praktek-praktek pembelajaran. Teori ini hingga kini masih merajai praktek-praktek pembelajaran, mulai dari pendidikan tingkat yang paling dini hingga pendidikan tinggi.

### **KEMUNGKINAN YANG DAPAT DITEMPUH SEKOLAH**

Anak-anak perlu mempersiapkan diri untuk memasuki era demokratisasi, suatu era yang ditandai dengan keragaman perilaku, dengan cara terlibat dan mengalami secara langsung proses pendemokrasian ketika mereka sedang berada di setting belajar (sekolah). Penghargaan terhadap ketidakpastian, ketidakmenentuan, perbedaan atau keragaman, perlu ditumbuhkan sedini mungkin. Keterlambatan hanya akan memunculkan peluang terjadinya peristiwa kekerasan sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini. Kita perlu melakukan kajiulang, atau dengan ungkapan lain, kita perlu melakukan reformasi, redefinisi, dan reorientasi bahkan revolusi terhadap landasan teoritik dan konseptual belajar dan pembelajaran, agar lebih mampu menumbuhkembangkan anak-anak bangsa ini untuk lebih menghargai keragaman.

Anak adalah manusia yang identitas insaninya sebagai subyek berkesadaran perlu dibela dan ditegakkan lewat sistem dan model pendidikan yang bersifat "bebas dan egaliter". Hal itu hanya dapat dicapai lewat proses pendidikan bebas dan metode pembelajaran aksi dialogal. Karena itu, peserta didik harus diperlakukan dengan amat hati-hati. Teori kognitif-konstruktivistik menekankan bahwa belajar lebih banyak ditentukan karena adanya karsa individu. Perataan kondisi bukan sebagai penyebab terjadinya belajar, tetapi sekedar memudahkan belajar. Keaktifan siswa menjadi unsur amat penting dalam menentukan kesuksesan belajar. Aktivitas mandiri adalah jaminan untuk mencapai hasil yang sejati.

Tantangan dunia pendidikan ke depan adalah mewujudkan proses demokratisasi belajar. Suatu proses pendemokrasian yang mencerminkan bahwa belajar adalah atas prakarsa anak. Demokrasi belajar berisi pengakuan hak anak untuk melakukan tindakan belajar sesuai dengan karakteristiknya. Salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat belajar yang demokratis dan/atau berkeadilan adalah adanya pengemasan pembelajaran yang beragam dengan cara menghapuskan penyeragaman kurikulum, strategi pembelajaran, bahan ajar, dan evaluasi belajar. Sekolah merupakan tempat untuk mengembangkan seluruh potensi anak secara maksimal termasuk nilai-nilai sosial.

Bentuk-bentuk hubungan antara guru dan murid perlu diperbaharui. Jika selama ini guru lebih otoriter, sarat komando, instruktif, bergaya birokrat, perlu diubah peranannya sebagai ibu/bapak, kakak, sahabat, atau mitra. Sering kali terjadi, dalam beberapa hal guru berperan sebagai murid dan murid justru sebagai gurunya. Proses belajar dalam hubungannya di antara murid satu dengan lainnya berubah. Praktek kompetisi dan lomba dengan pemberian *ranking* sungguh fatal, sebab di samping membentuk manusia-manusia eksklusif juga menjauhkan diri dari perkembangan moralnya. Selain itu, tindakan demikian hanya akan mengembangkan kebanggaan palsu dan penderitaan batin bagi siswa lainnya.

Untuk mengembangkan agar manusia menjadi matang tidak cukup bila ia hanya dilatih, tetapi juga harus dididik. Siswa harus dididik untuk realis, mengakui kehidupan yang multi-dimensional, tidak seragam, dan diajak menghayati kebinekaan yang saling melengkapi demi persaudaraan yang sehat, menghargai hak dan kewajiban sosial yang saling solider. Pada pelatihan terutama yang dibentuk adalah tingkah laku lahiriah, sedangkan pada pendidikan yang dibentuk adalah disposisi mental dan emosional (Sindhunata, 2001). Mendidik bukan berarti sekedar menjadikan anak trampil secara praktis terhadap lingkungannya. Mendidik juga berarti membantu anak untuk menjadi dirinya dan peka terhadap lingkungannya.

Pengaturan lingkungan belajar sangat diperlukan agar anak mampu melakukan kontrol terhadap pemenuhan kebutuhan emosionalnya. Lingkungan belajar yang demokratis memberi kebebasan kepada anak untuk melakukan

pilihan-pilihan tindakan belajar dan akan mendorong anak untuk terlibat secara fisik, emosional dan mental dalam proses belajar, sehingga akan dapat memunculkan kegiatan-kegiatan yang kreatif-produktif. Ini merupakan kaidah yang sangat penting dalam penataan lingkungan belajar. Setiap anak satu persatu dan/atau bersama-sama perlu diberi kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan sesuai dengan apa yang mampu dan mau dilakukannya.

Prakarsa anak untuk belajar akan mati bila kepadanya dihadapkan pada berbagai macam aturan yang tak ada kaitannya dengan belajar. Banyaknya aturan yang sering kali dibuat oleh pengajar dan harus ditaati oleh anak akan menyebabkan anak selalu diliputi rasa takut. Lebih jauh lagi, anak akan kehilangan kebebasan berbuat dan melakukan kontrol diri. Apa yang terjadi bila anak selalu dikuasai oleh rasa takut? Anak akan mengembangkan pertahanan diri (*defence mechanism*), sehingga yang dipelajari bukan-lah pesan-pesan pembelajaran, melainkan cara-cara untuk mempertahankan diri mengatas rasa takut. Anak-anak demikian tidak akan mengalami *growth in learning*, dan akan selalu menyembunyikan ketidakmampuannya.

Di samping kebebasan, hal penting yang perlu ada dalam lingkungan belajar yang demokratis dan berkeadilan adalah *realness*. Sadar bahwa anak mempunyai kekuatan di samping kelemahan, mempunyai keberanian di samping rasa takut dan rasa cemas, bisa marah di samping juga bisa gembira. *Realness* bukan hanya harus dimiliki oleh anak, tetapi juga oleh semua orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Lingkungan belajar yang bebas dan yang didasari oleh *realness* dari semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran akan dapat menumbuhkan sikap dan persepsi yang positif terhadap belajar. Sikap dan persepsi yang positif terhadap belajar menjadi modal dasar untuk memunculkan prakarsa belajar. Ini semua sangat penting untuk mengembangkan kemampuan mental yang produktif.

Pendidikan humanis dan/atau berkeadilan menghormati harkat martabat manusia termasuk anak-anak, bahkan janin yang ada dalam kandungan, mereka tetap manusia utuh. Hendaknya disingkirkan pandangan yang seolah-olah menganggap anak sebagai bejana kosong atau kertas kosong yang siap diisi oleh

guru atau orang tua dengan segala yang diinginkannya, agar anak semakin berisi, pandai dan dewasa. Yang perlu dilakukan, anak dilatih untuk menguasai berbagai teknik belajar, sehingga setelah menamatkan pendidikan formal di sekolah, mereka akan mampu untuk terus belajar, memperkaya, dan memperbaharui pengetahuan mereka untuk menjadi manusia yang humanis.

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan sosial adalah perlu adanya perubahan cara pandang dalam dunia pendidikan. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan agar pendidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta perubahan dunia. Pendidikan dengan perspektif global untuk menyiapkan peserta didik agar mampu berperan dalam konstalasi masyarakat global di samping berkarakter nasional. Kenyataan ini tampak dalam paradigma baru pendidikan nasional yang memberikan arah pada otonomi atau desentralisasi pendidikan, berorientasi pendidikan holistik untuk mengembangkan kesadaran individu akan nilai-nilai kesatuan dalam kemajemukan budaya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan religi, di samping mengembangkan kreativitas, produktivitas, berpikir kritis, bertanggungjawab, kemandirian, serta kemampuan berkolaborasi.

Tujuan di atas dapat tercapai jika sistem pendidikan dapat memberikan peluang lebih besar kepada guru untuk berimajinasi dan mengembangkan kreativitasnya. Guru dibebaskan dari berbagai hal teknis dan formalisme yang selama ini membelenggunya. Kondisi ini merupakan prasyarat agar guru juga mampu membebaskan peserta didik dari berbagai belenggu yang mengekang imajinasi dan kreativitasnya serta dalam rangka pembentukan karakter. Untuk itu, pendidikan yang membebaskan dan pendidikan kritis sudah waktunya untuk dijadikan acuan.

Kebebasan bukanlah sikap semaunya sendiri. Kebebasan mengarah kepada sikap penghargaan akan keunikan serta kekhasan masing-masing individu sebagai pribadi. Pada dasarnya, kebebasan pribadi setiap orang dibatasi oleh kebebasan pribadi orang lain. Aturan bersama tetap diperlukan. Akan tetapi kita perlu berhati-hati dalam membuat peraturan bersama, sebab fungsi utama aturan bersama tersebut adalah untuk menjaga agar kebebasan masing-masing pribadi



tetap bisa terpelihara dan terjamin. Jika aturan yang dibuat justru menghambat bahkan mematikan kebebasan, maka aturan tersebut sudah di luar proporsi yang semestinya. Oleh sebab itu, aturan atau hukum tetap diperlukan, akan tetapi jangan sampai peraturan/hukum tersebut menghambat perkembangan potensi pribadi yang khas dan unik. Dimensi kebebasan inilah yang membuat manusia mampu mengembangkan seluruh potensinya secara optimal, mampu mengkritisi dan memilih arah hidupnya.

Pandangan tentang konsep pendidikan yang membebaskan dan kritis ini akan tampak pada pergeseran pendidikan dari pendidikan yang lebih menekankan pada aspek kognitif menuju kepada seluruh aspek potensi manusia secara utuh. Pembelajaran lebih menekankan aktivitas siswa dari pada aktivitas guru. Pengelolaan pendidikan tidak lagi sentralistik dan monologis, melainkan ke arah desentralisasi, otonomi, demokrasi, serta berkeadilan. Pendidikan lebih kontekstual tidak terasing dari masyarakat, melainkan peka dan kritis terhadap persoalan di masyarakat. Kurikulum dikembangkan dari konsep-konsep dasar atau inti, berwawasan global dan sesuai kebutuhan lokal. Pembentukan kelompok atau ikatan-ikatan yang bersifat homogen atau eksklusif, menuju kepada kelompok-kelompok yang bersifat heterogen yang menganut pluralisme atau kemajemukan di bidang nilai dan budaya agar peserta didik menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang semakin manusiawi, yang semakin diresapi oleh kebenaran, kedamaian, cinta inklusif, dan keadilan (Asri, 2004).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asri Budiningsih, C., (2005). *Belajar dan pembelajaran*. Jakarta: P.T. Rineka Cipta
- Berybe, H., (2001). Dilema pelembagaan pendidikan. dalam Sindhunata, *Pendidikan: kegelisahan sepanjang jaman*. Yogyakarta: Kanisius.
- Degeng N.S., (1999). *Pandangan behavioristik vs konstruktivistik: pemecahan masalah belajar abad XXI*. Malang: Makalah Seminar TEP.
- Mangunwijaya., (2001). Mencari visi dasar pendidikan. dalam Sindhunata, *Pendidikan: kegelisahan sepanjang jaman*. Yogyakarta: Kanisius.